

---

# PROFIL POLITISI WANITA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(A Profile of Women's Political Participation  
within the DIY)

---

Ratnawati, Siti Muti'ah Setyawati, dan Bambang Purwoko

---

## Abstrak

*Dalam penelitian ini dikaji partisipasi politisi wanita di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari sumber daya politik anggota DPRD wanita, meneliti tingkat dan jenis partisipasi anggota DPRD wanita dalam proses pembuatan keputusan dan yang ketiga adalah mengevaluasi apakah wanita mendapat kesempatan dan didorong untuk berperan dalam proses pembuatan keputusan di tingkat regional.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, wanita didominasi oleh faksi mereka. Kondisi ekonomi juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Mereka cenderung pragmatis daripada idealis. Sejumlah anggota DPRD wanita cenderung belajar dengan berjalannya waktu (learning by process). Mereka kecewa jika tidak dapat mengakomodasikan kepentingan semua masyarakat dan akan memperjuangkannya pada waktu yang akan datang. Beberapa kendala yang dihadapi dalam menyampaikan aspirasinya adalah keterikatan mereka pada misi faksi/organisasinya. Hak budget dan hak amandemen belum mereka gunakan secara optimal.*

## Abstract

*This research examined women's political participation within the Daerah Istimewa Yogyakarta. There were three major foci of the research. The first was to study the political resources of female members of the house representatives (DPRD). The second was to examine the level and type of women's participation in the political decision making process. The third was to consider the degree to which women in the house of representatives are allowed or encouraged to play a role in the political decision making process at the regional level.*

[Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk](#)

RE  
by UGM Journals, OAI Repository

*organizational affiliation. Economics also influence their decision making; women representatives tend more towards pragmatism than idealism. A certain percentage of women representatives were "learning by process"; that is, recognizing their moral*

*responsibility as representatives of the people, they were disappointed if they were unable to accommodate everyone's interests. They expressed their determination to achieve that goal in the future. Many difficulties appeared to be related to their appointment as based on organizational proxy. Budgetary rights were not optimally used nor were amendment rights. These phenomena were likely related to member dependence on their local organization's mission.*



## I. Pendahuluan

Selama lima periode keanggotaan DPRD Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ada peningkatan jumlah anggota wanita terutama yang berlatar belakang dari organisasi wanita yang didasarkan pada jabatan/kedudukan suami (Dharma Pertiwi, Dharma Wanita, dan PKK). Peningkatan jumlah anggota DPRD wanita ini, ternyata tidak diikuti dengan peningkatan perlakuan dan peran mereka sebagai wakil rakyat dan penyalur serta kepentingan wanita khususnya. Apakah hal ini disebabkan karena faktor internal anggota DPRD wanita atau karena faktor eksternal?

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian dengan *Profil Politisi Wanita di Daerah Istimewa Yogyakarta* ini akan mengkaji masalah-masalah:

1. Bagaimana sumber daya anggota DPRD wanita itu;
2. Bagaimana frekuensi dan intensitas partisipasi anggota DPRD wanita dalam proses-proses persidangan di DPRD untuk pengambilan keputusan politik;
3. Apakah sistem dan atmosfer DPRD memberikan peluang dan kesempatan bagi anggota wanita untuk berperan dan memberikan kontribusinya dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan politik di tingkat Daerah.

Untuk memecahkan masalah

penelitian tersebut, akan digunakan teori profil Gender dari suatu kelompok sosial yang berasal dari Kerangka Analisis Harvard atau yang disebut dengan GFA (Gender Framework Analysis).

Menurut Kerangka Analisis Harvard, profil Gender dari suatu kelompok sosial tersusun atas tiga elemen pokok, yaitu profil aktivitas, profil akses dan kontrol, dan faktor-faktor yang berpengaruh.

Untuk profil aktivitas masih dikelompokkan menjadi tiga, yaitu aktivitas produktif, aktivitas reproduktif (aktivitas rumah tangga), dan aktivitas-aktivitas sosial, politik dan keagamaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka aktivitas produktif, biasanya mereka mendapat imbalan/gaji. Berbeda dengan aktivitas produktif, maka aktivitas reproduktif tidak mendapatkan imbalan dan biasanya merupakan kegiatan-kegiatan yang diberikan karena statusnya (antara lain karena sebagai seorang istri dan seorang ibu), sedangkan aktivitas sosial, lebih berkaitan dengan kegiatan-kegiatannya sebagai anggota masyarakat.

Selanjutnya mengenai profil akses dan kontrol, pada dasarnya berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, peluang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, penguasaan atas aktivitas-aktivitas tersebut, dan manfaat yang diperoleh dari melakukan aktivitas-aktivitas

tersebut, sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh, dalam hal ini menyangkut hal-hal yang mengakibatkan adanya pembagian kerja dan adanya profil akses dan kontrol.

Berkaitan dengan teori profil gender suatu kelompok sosial dari Kerangka Harvard tersebut, maka *Profil Politisi Wanita* (dalam hal ini Profil Anggota DPRD Wanita), akan dikaji dengan melihat:

1. Aktivitas/kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi perwakilan/representatif politik; sebagai aktivitas produktif, peranan anggota DPRD wanita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut mendapat imbalan atau gaji yang setimpal;
2. Kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, antara lain berkaitan dengan tingkat pendidikan, latar belakang organisasi, pengalaman berorganisasi, kedekatan dan perhatian terhadap masalah-masalah masyarakat daerahnya, dan sebagainya;
3. Peluang dan kesempatan untuk merealisasikan sumber daya yang ada dalam proses legislasi, pengawasan atas eksekutif, dan perwakilan;
4. Manfaat yang diperoleh dari kedudukannya sebagai anggota DPRD wanita, serta;
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktualisasi anggota DPRD wanita sebagai wakil dan penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat umumnya dan kaum wanita khususnya.

Sehubungan dengan itu, maka tujuan penelitian adalah mengkaji hal-hal sebagai

berikut:

1. Masalah sumber daya anggota DPRD wanita, baik yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, latar belakang organisasi maupun pengalaman berorganisasi;
2. Menelaah frekuensi dan intensitas partisipasi dan aktivitas para anggota DPRD wanita dalam rangka pelaksanaan fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi perwakilan/representatif politik;
3. Menelaah masalah peluang dan kesempatan untuk merealisasikan sumber daya yang ada dalam rangka melaksanakan perannya sebagai anggota DPRD, serta manfaat yang diperoleh dari kedudukannya sebagai anggota DPRD wanita;
4. Mengkaji masalah sistem dan atmosfer DPRD memberikan peluang dan kesempatan bagi anggota wanita untuk berperan dan memberikan kontribusinya dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan politik di Tingkat Daerah.

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. secara teoritis, diharapkan bisa dikembangkan kerangka pemikiran yang prospektif untuk pengembangan konsep gender dalam politik dan pemerintahan;
2. bersamaan dengan hal pertama, maka secara metodologis secara langsung atau tidak, juga diharapkan akan membuka peluang bagi pengembangan metode yang bisa diterapkan untuk mengkaji masalah politik dari perspektif gender;
3. akhirnya, penelitian ini juga diharapkan menghasilkan masukan dan saran

praktis bagi *policy-maker* untuk lebih memperhatikan faktor internal anggota dalam mengoptimalkan peran DPRD dalam kehidupan politik Indonesia.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPRD Tingkat II di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan responden semua anggota DPRD wanita, yaitu sebanyak 19 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey-mendalam. Sehubungan dengan itu, maka untuk memperoleh data yang diperlukan, alat atau teknik pengumpulan data yang utama digunakan adalah wawancara dengan mendasarkan diri pada angket, *check-list* dan *depth-interview*.

## III. Hasil Dan Pembahasan

Dilihat dari aspek pendidikan, maka kondisi tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh oleh para anggota DPRD wanita dapat dilihat dalam tabel berikut:

Dengan tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh sebagian besar anggota DPRD wanita pada tingkat SMA, nampaknya perlu dipikirkan untuk lebih

meningkatkan lagi, mengingat tuntutan tugas yang harus dilakukan oleh anggota dewan cukup berat, apalagi berhadapan dengan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) yang dalam beberapa potensi dan fasilitas lebih tinggi dibandingkan dengan DPRD. Usaha untuk meningkatkan pendidikan para anggota DPRD wanita ini, tidak semata-mata melalui pendidikan formal saja, tetapi juga bisa dilakukan lewat jalur pendidikan non formal.

Dalam hal ini, latar belakang pekerjaan yang dilihat adalah pekerjaan para anggota DPRD wanita sebelum menjadi anggota dewan. Pekerjaan tersebut pada saat sekarang ini sudah tidak dilakukannya lagi, bisa masih tetap diemban/tetap aktif, atau untuk sementara tidak aktif. Berdasarkan hal ini, maka pekerjaan yang dipangku oleh para anggota DPRD wanita sebelum menjadi anggota dewan adalah seperti terlihat pada tabel 2.

Dilihat dari jenis organisasi yang melatarbelakangi para anggota DPRD wanita ini, tabel berikut memperlihatkan data sebagai berikut:

Sebagian besar para anggota DPRD wanita ini berasal dari Dharma Pertiwi

**Tabel 1.** Profil Anggota DPRD Tingkat II Wanita Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 1997-2002

DPRD Kotamadya/Kab. Daerah Tingkat II	SD	SLTP	SLTA	Sarjana Muda / D3	Sarjana (S 1)	Juml.
Yogyakarta	-	-	1	-	1	2
Slaman	-	-	1	-	2	3
Bantul	-	-	3	2	-	5
Gunung Kidul	-	1	2	2	-	5
Kulon Progo	-	-	2	2	-	4

Sumber: Sekretariat masing-masing DPRD Tingkat II

**Tabel 2.** Pekerjaan Anggota DPRD Sebelum Menjadi Anggota DPRD Tingkat II Periode Tahun 1997-2002

DPRD Kotamadya/Kab. Daerah Tingkat II	Pegawai Negeri	Pegawai Swasta	Wira-swasta	Ibu Rumah Tangga	Jumlah
Yogyakarta	1	-	1	-	2
Sleman	2	-	1	-	3
Bantul	2	-	2	1	5
Gunung Kidul	4	-	-	1	5
Kulon Progo	3	-	1	-	4
Jumlah	12	-	5	2	19

Sumber: Sekretariat masing-masing DPRD Tingkat II

(Organisasi istri anggota ABRI, seperti Persit Kartika Chandra Kirana dan Bhayangkari) dan Himpunan Wanita Karya (HWK—ormas Golkar). Nampaknya hal ini paralel dengan kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka berasal dari fraksi karya pembangunan (Golkar). Di samping itu, kenyataan ini juga semakin memperkuat kenyataan bahwa kekuatan Golkar bersumber dari tiga jalur, yaitu jalur A

(ABRI dan ormasnya), jalur B (Birokrasi), dan jalur G (Golkar). Anggota DPRD wanita yang berasal dari Dharma Pertiwi merupakan anggota Golkar dari jalur A, sedangkan mereka yang berasal dari HWK dan PKK merupakan anggota Golkar dari jalur G. Di samping itu, dengan latar belakang pekerjaan mereka yang sebagian besar pegawai negeri—yang berarti juga merupakan anggota Golkar dari jalur B—

**Tabel 3.** Keanggotaan Organisasi Sebelum Menjadi Anggota DPRD Tingkat II (Periode 1997 - 2002)

DPRD Kotamadya/Kab. Daerah Tingkat II	Parpol	HWK	Dharma Pertiwi	PKK	Anggota ABRI
Yogyakarta	-	-	1	1	-
Sleman	-	1	2	-	-
Bantul	1	-	2	1	1
Gunung Kidul	-	2	2	1	-
Kulon Progo	-	2	2	-	-
Jumlah	1	5	9	3	1

Sumber: Data Primer

semakin "solid" nya kedudukan mereka di DPRD.

Nampaknya yang secara teoritis dikemukakan bahwa keluarga merupakan salah satu agen proses sosialisasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu, mengandung kebenaran. Hal ini nampak ketika dianalisis ternyata sebagian besar dari anggota DPRD wanita, berasal dari lingkungan keluarga yang pernah dan sedang aktif di suatu organisasi sosial-politik. Tabel berikut ini memperlihatkan kenyataan tersebut.

Selanjutnya, jika dikaji dari faktor motivasi, nampaknya para anggota DPRD Tingkat II wanita ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, lebih didominasi oleh faktor kepentingan fraksi atau organisasi induknya. Di samping itu, terlihat bahwa faktor ekonomi juga melingkupi anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, mereka tidak semata-mata bekerja karena "idealisme", tetapi juga mempertimbangkan masalah "pragmatisme".

Dalam pada itu, juga dapat dikemukakan bahwa sebagian besar dari anggota DPRD Tingkat II wanita ini memahami tugas pokoknya sebagai legislator, walaupun sebagian mereka masih ada yang *learning by process*. Mereka

mempunyai tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat, sehingga ketika mereka berupaya untuk mengakomodasikan kepentingan rakyat mengalami kegagalan, mereka merasa kecewa dan tetap terus berupaya agar terealisasi. Walaupun demikian,

mereka belum maksimal melaksanakan tugas yang *people minded*. Hal ini nampaknya merupakan konsekuensi dari kedudukan DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dan penunjukan anggotanya atas dasar wakil organisasi.

Di antara hak-hak yang paling

tidak atau belum optimal digunakan oleh anggota DPRD adalah hak budget/anggaran, kemudian berturut-turut hak mengajukan/menyampaikan pernyataan, meminta keterangan, dan hak bertanya. Hak yang sedikit banyak sudah optimal dilaksanakan/digunakan adalah hak mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Daerah. Fenomena ini nampaknya terkait dengan keterikatan para anggota DPRD dengan fraksi atau organisasi induknya sehingga ruang gerak mereka terbatas.

#### IV. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka kesimpulan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Anggota Keluarga**  
**yang Pernah Aktif di Organisasi**

Status Anggota Keluarga	Jumlah
Bapak	8
Ibu	4
Bapak dan Ibu	-
Suami	10
Mertua	4
Tidak ada	1

Sumber: Data Primer



1. Hampir separo dari anggota DPRD Tingkat II wanita berpendidikan SMTA.
2. Dilihat latar belakang pekerjaan menunjukkan bahwa 63,16% anggota DPRD Tingkat II wanita di wilayah DIY latar belakang pekerjaannya sebagai pegawai negeri, dan hingga saat ini mereka masih tetap aktif menjalankan pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Hal inilah yang nampaknya merupakan salah satu faktor yang turut menyebabkan para anggota DPRD tidak efektif dan tidak optimal menjalankan tugasnya sebagai pengontrol eksekutif dan wakil rakyat seperti yang disinyalir oleh banyak kalangan.
3. Berdasarkan latar belakang organisasinya, bagian terbesar dari anggota DPRD wanita ini berasal dari Dharma Pertiwi (Organisasi Istri Anggota ABRI seperti Persit Kartika Chandra Kirana dan Bhayangkari) dan Himpunan Wanita Karya (HWK-Ormas Golkar). Nampaknya hal ini paralel dengan kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka berasal dari Fraksi Karya Pembangunan (Golkar).
4. Dilihat dari latar belakang keluarganya, ternyata sebagian besar dari anggota DPRD wanita berasal dari lingkungan keluarga yang pernah dan sedang aktif di suatu organisasi sosial-politik.
5. Di samping itu, para anggota DPRD Tingkat II wanita ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, didominasi oleh faktor kepentingan fraksi atau organisasi induknya. Di samping itu, terlihat bahwa faktor ekonomi juga melingkupi anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, mereka tidak semata-mata bekerja karena "idealisme", tetapi juga mempertimbangkan masalah "pragmatisme".
6. Sebagian besar dari anggota DPRD Tingkat II wanita ini memahami tugas pokoknya sebagai legislator, walaupun sebagian mereka masih ada yang *learning by process*. Mereka mempunyai tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat sehingga ketika mereka berupaya untuk mengakomodasikan kepentingan rakyat mengalami kegagalan, merasa kecewa dan tetap terus berupaya agar terealisasi. Walaupun demikian, mereka belum maksimal melaksanakan tugas yang *people minded*. Dan ini nampaknya merupakan konsekuensi dari kedudukan DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dan penunjukkan anggotanya atas dasar wakil organisasi.
7. Di antara hak-hak yang paling tidak/ belum optimal digunakan oleh anggota DPRD adalah hak budget/ anggaran, kemudian berturut-turut hak mengajukan/ menyampaikan pernyataan, hak meminta keterangan, dan hak bertanya. Hak yang sedikit banyak sudah optimal dilaksanakan/ digunakan adalah hak mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Daerah. Fenomena ini nampaknya terkait dengan keterikatan para anggota

DPRD dengan fraksi atau organisasi induknya sehingga ruang gerak mereka terbatas. ◯

### **Daftar Pustaka**

- Alfian. "Masalah Pelaksanaan Fungsi DPR yang diinginkan oleh UUD 1945" dalam *Jurnal Ilmu Politik*, No. 7 Tahun 1990.
- Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (terj.). Jakarta: PT Bina Aksara
- Miriam Budiarjo. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kavanagh, Dennis. 1982. *Kebudayaan Politik* (terj.). Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Kweit, MG., dan Robert K. Kweit. 1986. *Konsep dan Metoda Anakisa Politik* (terj.). Jakarta: PT. Bina Aksara.
- BN. Marbun. 1983. *DPRD: Pertumbuhan, Masalah, dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arbi Sanit. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Scott, William G. 1962. *Human Relation in Management: A Behavioral Science Approach*. Illinois: Home Wood. Richard D. Irwin Inc.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.

